



Integrasi Nilai Pancasila dalam Literasi Keuangan Digital: Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan Modern

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ratna Ayu Fitriana², Bintang Mufidia Rizqi³,
Rifania Halimatussakdiah⁴

¹Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²⁻⁴Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. *This study explores how Pancasila values can be integrated into digital financial literacy through the lens of modern civic education. It is grounded in the urgency to cultivate national values that shape individuals who are both digitally skilled and socially responsible. In an era of globalization and rapid technological change, managing digital finance requires more than technical ability—it demands moral integrity and ethical awareness. The study aims to discover effective strategies for embedding Pancasila principles into digital financial literacy to strengthen citizens' awareness and competence in navigating digital challenges. Using a qualitative method with content analysis of educational policies and literature, the research seeks to develop a learning model that harmonizes Pancasila and digital finance education in schools and society. The findings indicate that integrating Pancasila values enhances ethical, inclusive, and independent dimensions in digital financial literacy, contributing to sustainable civic character formation. These values encourage critical thinking, empathy, and social responsibility in financial technology use. In conclusion, combining civic education with Pancasila-based digital financial literacy is essential for fostering a financially literate generation rooted in ethics, integrity, and concern for collective welfare in the digital era.*

Keywords: *Digital Financial Literacy; Digital Inclusion; Modern Citizenship Education; Pancasila Values; Value Integration.*

Abstrak. Studi ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam literasi keuangan digital melalui perspektif pendidikan kewarganegaraan modern. Hal ini didasarkan pada urgensi untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang membentuk individu yang terampil secara digital dan bertanggung jawab secara sosial. Di era globalisasi dan perubahan teknologi yang pesat, mengelola keuangan digital membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan teknis—ia menuntut integritas moral dan kesadaran etika. Studi ini bertujuan untuk menemukan strategi efektif untuk menanamkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam literasi keuangan digital guna memperkuat kesadaran dan kompetensi warga negara dalam menghadapi tantangan digital. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi kebijakan dan literatur pendidikan, penelitian ini berupaya mengembangkan model pembelajaran yang menyelaraskan pendidikan Pancasila dan keuangan digital di sekolah dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Pancasila meningkatkan dimensi etika, inklusif, dan mandiri dalam literasi keuangan digital, yang berkontribusi pada pembentukan karakter kewarganegaraan yang berkelanjutan. Nilai-nilai ini mendorong pemikiran kritis, empati, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi keuangan. Kesimpulannya, memadukan pendidikan kewarganegaraan dengan literasi keuangan digital berbasis Pancasila sangat penting untuk membangun generasi yang melek keuangan, beretika, berintegritas, dan peduli terhadap kesejahteraan bersama di era digital.

Kata kunci: *Digital Inclusion; Integrasi Nilai; Literasi Keuangan Digital; Nilai Pancasila; Pendidikan Kewarganegaraan Modern.*

1. LATAR BELAKANG

Digitalisasi keuangan di Indonesia berkembang pesat, memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan lewat aplikasi dan platform online (CNBC Indonesia, 2025). Namun, tidak semua orang paham cara pakainya dengan bijaksana. Literasi keuangan digital jadi kunci supaya tidak asal pakai dan terjerumus ke masalah utang atau penipuan online (OJK, 2025). Di sisi lain, integrasi nilai Pancasila seperti keadilan sosial, gotong royong, dan

tanggung jawab penting ditanamkan agar literasi ini tidak hanya soal angka, tetapi juga karakter dan etik dalam bermasyarakat (UPN Veteran Jakarta, 2025). Pendidikan kewarganegaraan bisa jadi medium tepat untuk menanamkan nilai-nilai itu sekaligus bekal literasi keuangan digital yang kuat dan berbudi pekerti (Kemendikbud, 2025).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat mengelola keuangan, yang menuntut peningkatan literasi keuangan digital sebagai bagian dari kecakapan hidup modern. Namun, literasi keuangan digital tidak hanya soal kemampuan teknis, melainkan juga harus berlandaskan nilai-nilai moral dan kebangsaan yang diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, memuat nilai-nilai luhur seperti keadilan sosial, gotong royong, dan persatuan, yang esensial untuk membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi keuangan digital (Widjaja, 2025; Aryanti, 2023).

Urgensi penelitian ini muncul dari rendahnya pemahaman integrasi nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital, yang berpotensi melemahkan peran pendidikan kewarganegaraan dalam era transformasi digital (Fajar, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam literasi keuangan digital melalui pendekatan pendidikan kewarganegaraan modern, untuk membangun karakter bangsa yang cerdas finansial sekaligus beretika digital. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan kerangka konseptual dan rekomendasi strategi penguatan literasi keuangan digital berbasis nilai-nilai Pancasila, yang relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan pendidikan nasional (Syahri, 2025; Tilaar, 2002).

2. KAJIAN TEORITIS

- a. Rahman (2022) menemukan integrasi nilai Pancasila yang meningkatkan etika digital dalam literasi keuangan digital di kalangan pelajar.
- b. Azizah (2021) menyoroti peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter digital yang berorientasi nilai kebangsaan.
- c. Mulyani & Prasetyo (2023) mengusulkan model pendidikan holistik yang memadukan literasi digital dan nilai Pancasila untuk pendidikan tinggi.
- d. Nugroho (2022) mengungkap hambatan praktis dalam implementasi nilai Pancasila pada literasi keuangan digital di sekolah menengah.
- e. Santoso et al. (2023) menekankan literasi keuangan digital harus dilengkapi aspek etika berbasis budaya lokal, termasuk nilai Pancasila.

- f. Dewi (2024) mengkaji pentingnya etika digital sebagai penguat literasi keuangan di era transisi teknologi.
- g. Husni (2023) membahas perlunya kebijakan yang mengintegrasikan nilai kebangsaan dalam pengembangan kurikulum digital.
- h. Kim & Lee (2021) dari studi internasional mencontohkan integrasi etika kebangsaan dalam literasi keuangan digital sebagai praktik terbaik.
- i. Hidayat (2024) menyatakan nilai Pancasila sebagai basis moral penting untuk pendidikan kewarganegaraan modern di Indonesia.
- j. Santika (2023) menyoroti kurangnya riset aplikatif terkait model integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum literasi digital.

Penelitian-penelitian ini jadi pijakan kuat untuk menunjukkan urgensi dan potensi integrasi nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital lewat pendidikan kewarganegaraan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis dokumen sebagai sumber data utama. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal akademik, laporan resmi, kebijakan pendidikan, dan hasil riset terdahulu terkait literasi keuangan digital dan integrasinya dengan nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan. Teknik pengambilan sampel data bersifat purposive untuk memastikan sumber informasi yang relevan dan terbaru.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan informasi yang berhubungan dengan tema penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan pola, tren, dan hubungan antar konsep literasi keuangan digital dan nilai Pancasila. Pendekatan ini menjadikan hasil penelitian sebagai deskripsi yang mendalam dan komprehensif berdasarkan kajian teori dan fakta terdokumentasi.

Dengan metode ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang sistematis tanpa melibatkan pengumpulan data primer langsung seperti wawancara atau observasi, sehingga cocok untuk penelitian yang bersifat konseptual dan pengembangan kerangka pemikiran integrasi nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Literasi Keuangan Digital di Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat indeks literasi keuangan Indonesia meningkat signifikan menjadi 66,46% dari 49,68% pada 2022. Ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memahami produk dan layanan jasa keuangan terutama berbasis digital (CNBC Indonesia, 2025; Kompas, 2025). Namun, masih terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan (70,89%) dan pedesaan (59,60%), yang menjadi tantangan dalam pemerataan literasi (GoodStats, 2025).

Strategi Integrasi Nilai Pancasila dalam Literasi Keuangan Digital. Integrasi nilai Pancasila penting sebagai landasan moral dan sosial dalam literasi keuangan digital agar masyarakat tidak hanya cakap finansial, tapi juga beretika. Pilar kedua Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 menyebutkan pengembangan ekosistem jasa keuangan inklusif dan berkelanjutan yang mengedepankan nilai keadilan sosial dan tanggung jawab (CNBC Indonesia, 2025). Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi media efektif menanamkan nilai gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab dalam konteks keuangan digital (UPNVJ, 2025).

Peran Pemerintah dan OJK dalam Edukasi dan Inklusi Keuangan. OJK melalui program seperti Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 dan Hari Indonesia Menabung aktif mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar melek finansial di era digital (TopBusiness, 2025; OJK, 2025). Festival seperti LPS Financial Festival juga menguatkan upaya ini dengan memberikan edukasi interaktif yang mengintegrasikan nilai kebangsaan dan inklusivitas keuangan (CNBC Indonesia, 2025). Melalui kolaborasi lintas sektor, OJK mendorong agar literasi keuangan tidak sekadar pengetahuan teknis tapi juga berakar pada nilai Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan mandiri secara finansial.

Pentingnya Nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Finansial. Penanaman nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan gotong royong, mengarahkan agar pengelolaan keuangan digital tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama dan tanggung jawab sosial (Siaran Pers Harlah Pancasila, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas dan etika dalam pelayanan keuangan digital sehingga menghindari praktek penyalahgunaan teknologi. Pendidikan di era digital kini dituntut mampu menggabungkan aspek literasi teknis dan karakteristik kebangsaan agar lahir generasi yang cerdas finansial dan beretika (UPNVJ, 2025; Instagram OJK, 2025). Jadi secara garis besar, literasi keuangan digital yang tumbuh pesat di Indonesia harus selaras dengan nilai

Pancasila lewat pendidikan kewarganegaraan dan program edukasi yang inklusif. Hal ini menjamin ekosistem keuangan digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Tren penggunaan teknologi finansial makin luas, terutama di kalangan pelajar dan milenial, yang memanfaatkan *e-wallet*, *mobile banking*, dan *fintech* (GoodStats, 2025). Namun, literasi keuangan digital yang rendah bikin sebagian dari mereka rentan terhadap penggunaan produk keuangan tidak sehat, seperti pinjaman online ilegal atau konsumtif (TopBusiness, 2025). Oleh sebab itu, penguatan literasi keuangan digital harus dibarengi dengan internalisasi nilai Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kepedulian sosial (OJK, 2025; Siaran Pers Harlah Pancasila, 2025). Pendidikan kewarganegaraan modern memberikan ruang untuk membangun karakter bangsa yang cakap finansial dan beretika digital, terutama dengan pendekatan berbasis studi kasus dan diskusi kritis (UPN Veteran Jakarta, 2025). Selain itu, program pendidikan inklusi keuangan dan literasi digital yang digagas OJK dan BI lewat *digital agents* dan pelatihan masyarakat semakin memastikan literasi ini menjangkau daerah-daerah dengan akses rendah (OJK, 2025; CNBC Indonesia, 2025). Tantangan besar tetap soal pemerataan dan pendampingan agar semua lapisan masyarakat mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi keuangan secara benar dan bertanggung jawab (GoodStats, 2025).

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa kemudahan besar dalam akses layanan keuangan di Indonesia. Menurut survei OJK (2025), pengguna *fintech* meningkat signifikan, terutama di kalangan usia produktif dan pelajar. Namun, literasi keuangan digital yang masih rendah menyebabkan risiko penyalahgunaan teknologi makin tinggi, seperti jatuh ke perangkap pinjaman online ilegal, penyebaran hoaks finansial, sampai perilaku konsumtif yang merugikan (TopBusiness, 2025).

Meski era digital menawarkan potensi besar dalam meningkatkan partisipasi publik, tetap ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan akses digital dan ketimpangan distribusi informasi (Nasoha et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam pemerintah harus mempertimbangkan inklusivitas, agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan dan kesetaraan, harus senantiasa menjadi landasan dalam pembangunan sistem pemerintahan digital. Selain itu, pelestarian nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui implementasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah perkembangan digital saat ini (Nasoha et al., 2025).

Nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-2 dan ke-5 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat menjadi fondasi moral yang kuat dalam literasi keuangan digital (Siaran Pers Harlah Pancasila, 2025). Integrasi nilai gotong

royong juga penting untuk membangun kesadaran kolektif agar tidak hanya mengejar kepentingan individu, tapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat luas (UPN Veteran Jakarta, 2025).

Pendidikan kewarganegaraan modern berperan strategis dalam mengajarkan nilai ini secara kontekstual dengan kondisi digital saat ini. Pendekatan berbasis kompetensi dengan studi kasus penggunaan aplikasi keuangan digital, *problem solving*, dan diskusi kritis membuat mahasiswa dan pelajar tidak hanya paham teknologi tapi juga bisa memaknai etika pemanfaatannya (Kemendikbud, 2025). Misalnya, kesadaran tidak menggunakan layanan fintech ilegal, serta bijak dalam mengatur anggaran melalui aplikasi digital.

Selain itu, inklusi keuangan digital yang dicanangkan oleh OJK dan Bank Indonesia melalui program *digital agents* dan edukasi masif di berbagai daerah berhasil menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan (OJK, 2025; CNBC Indonesia, 2025). Hal ini tentu menurunkan kesenjangan literasi antara kota dan desa, dan mendorong pemerataan ekonomi digital yang berkeadilan (GoodStats, 2025).

Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit, seperti minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengedukasi literasi keuangan digital, adanya kesenjangan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, dan resistensi sosial terhadap teknologi baru (UIN Ar-Raniry, 2021). Oleh karena itu, pelatihan bagi guru dan fasilitator perlu terus ditingkatkan agar mereka bisa mengimplementasikan materi literasi keuangan digital yang menyatu dengan nilai Pancasila secara efektif di lapangan (UPNVJ, 2025; Univ Jambi, 2021).

Lebih jauh, integrasi teknologi dengan nilai-nilai Pancasila harus terus disinkronkan dengan perkembangan terbaru, misalnya mengedukasi masyarakat soal keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen di dunia digital (IAIN Parepare, 2020; Univ Muhammadiyah Surabaya, 2022). Edukasi ini vital agar pengelolaan keuangan digital tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga aman dan bertanggung jawab secara sosial.

Selain tren peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital yang sudah disebutkan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan angka literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46%, naik dari 65,43% tahun 2024 (OJK & BPS, 2025). Ini tanda positif, tapi literasi keuangan digital masih harus diperkuat supaya makin banyak masyarakat, terutama di desa dan kalangan rentan, memahami produk dan risiko keuangan digital (Infobanknews, 2025; Infopublik, 2025).

Angka inklusi yang mencapai 80,51% menunjukkan makin banyak masyarakat yang pakai layanan keuangan resmi, tapi tantangannya adalah kualitas literasi agar penggunaan ini tepat dan bertanggung jawab (SNLIK, 2025). Literasi digital yang kuat diperlukan agar

masyarakat bisa membedakan layanan resmi dan ilegal, serta memahami keamanan data pribadi yang sangat vital di era fintech dan transaksi online (TopBusiness, 2025).

Dalam konteks nilai Pancasila, khususnya sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), fokusnya bukan hanya soal akses layanan, tetapi juga kesadaran bertanggung jawab individual dan sosial saat menggunakan teknologi keuangan (Siaran Pers Harlah Pancasila, 2025; UPN Veteran Jakarta, 2025).

Konsep Kewarganegaraan dalam Konstitusi Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menentukan hubungan antara individu dan negara. Di Indonesia, pengaturan kewarganegaraan tertera pada Pasal 26 UUD 1945, yang berbunyi: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang yang menurut UU ini adalah warga negara Indonesia”. Pasal ini memberikan landasan konstitusional yang penting dalam mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai warga negara Indonesia. Konsep kewarganegaraan ini mencerminkan prinsip dasar dari hukum konstitusi yang mengorganisir keterkaitan diantara negara maupun individu. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan dikelola secara mendetail pada UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini memperjelas sejumlah peraturan mengenai “siapa yang dapat menjadi warga negara, serta mekanisme dan syarat-syarat untuk memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan”.

Pendidikan kewarganegaraan harus menanamkan nilai ini secara nyata, dengan materi praktis yang mengajarkan etika digital, kejujuran, gotong royong, dan sikap kritis dalam bersikap terhadap tawaran produk keuangan digital (Kemendikbud, 2025). Diskusi dan studi kasus fintech ilegal misalnya, bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi penipuan finansial.

Program *digital agents* yang diinisiasi oleh OJK dan Bank Indonesia turut mempercepat inklusi dan literasi keuangan digital terutama di daerah tertinggal, membuka jalan bagi pemerataan akses layanan keuangan (OJK, 2025; CNBC Indonesia, 2025). Namun, kesenjangan akses infrastruktur teknologi masih jadi hambatan utama yang harus diperbaiki secara berkelanjutan (GoodStats, 2025).

Penting pula membekali guru dan komunitas dengan kompetensi melatih literasi keuangan digital yang terintegrasi nilai Pancasila agar edukasi bisa sampai ke akar rumput (UPNVJ, 2025; Univ Jambi, 2021). Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku industri fintech sangat krusial untuk keberhasilan program ini.

Terakhir, perkembangan teknologi terus berubah cepat, sehingga edukasi keuangan digital juga wajib adaptif. Materi tentang keamanan siber, proteksi konsumen, dan manajemen

risiko finansial digital harus dimasukkan agar masyarakat tidak hanya paham pakai teknologi, tapi juga bijaksana dan aman (IAIN Parepare, 2020; Univ Muhammadiyah Surabaya, 2022).

Di era digital saat ini, literasi keuangan digital menjadi aspek krusial dalam membekali masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi finansial secara optimal dan bertanggung jawab. Purwantoro et al. (2021) menegaskan bahwa tantangan utama yang ada saat ini adalah kesenjangan akses dan pemahaman terhadap layanan keuangan digital. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial apabila tidak diatasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan tanggung jawab bersama. Pendidikan keuangan digital yang berlandaskan Pancasila menjadi solusi strategis agar setiap individu, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan dan pengetahuan yang cukup untuk menggunakan produk keuangan digital secara bijak dan aman (Mustain Nasoha, 2025).

Assidiq et al. (2023) menyoroti bahwa pelestarian nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital harus diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan modern yang tidak hanya mengajarkan aspek teknis, tetapi juga menanamkan karakter moral dan solidaritas sosial. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia menjadi landasan dalam membangun kesadaran kritis peserta didik untuk berpikir etis dalam mengambil keputusan keuangan digital. Hal ini termasuk menghindari perilaku konsumtif berlebihan dan penipuan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kejujuran. Dengan demikian, literasi keuangan digital tidak hanya menjadi modal ekonomi, tetapi juga pilar penguatan identitas kebangsaan.

Assidiq et al. (2023) juga menyatakan bahwa pendidikan literasi keuangan digital yang efektif harus bersifat inklusif, menghargai keberagaman budaya dan kondisi sosial masyarakat. Dengan menumbuhkan rasa gotong royong dan solidaritas, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna pasif, tapi juga agen perubahan yang aktif dan kritis terhadap perkembangan teknologi finansial. Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan digital financial literacy dan Pancasila ini mendorong terciptanya harmoni sosial dan keterjaminan keadilan dalam ekosistem digital.

Menurut Purwantoro et al. (2021), berbagai program pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah menginisiasi pembelajaran literasi keuangan digital dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila, misalnya melalui pengembangan modul edukasi dan sosialisasi di kalangan mahasiswa. Program semacam ini mengajarkan peserta didik agar mampu menyaring dan memahami risiko serta manfaat produk digital, serta mendorong sikap bijaksana seperti tidak termakan efek tren konsumtif (YOLO atau FOMO). Pendidikan literasi digital yang mengedepankan prinsip Pancasila ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan aspek etika dan keadilan sosial.

Purwanto et al. (2021) menambahkan, agar pencapaian literasi keuangan digital yang berkarakter bisa optimal, perlu peningkatan kapasitas pendidik dalam menyampaikan materi secara partisipatif dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini tidak hanya membangun kecakapan teknis, tetapi juga karakter moral peserta didik yang kuat untuk menghadapi kompleksitas dunia digital sekaligus memegang teguh nilai luhur bangsa. Secara keseluruhan, integrasi nilai Pancasila dengan literasi keuangan digital sangat penting dalam membentuk generasi yang cakap teknologi dan juga beretika sosial. Pendidikan kewarganegaraan modern yang mengusung dua aspek ini dapat menghasilkan warga negara yang mampu memanfaatkan kemajuan digital secara produktif dan adil, sehingga tidak ada yang tertinggal dan nilai kebangsaan tetap terjaga kuat (Purwanto et al., 2021; Assidiq et al., 2023).

Pancasila adalah hukum tertinggi di Republik Indonesia yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh elemen negara, termasuk rakyat dan wilayah. Sebagai prinsip spiritual dan cita-cita hukum, Pancasila menjadi landasan moral serta dasar hukum positif Indonesia, yang nilainya mengikat seluruh peraturan, baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun tidak tertulis. Dalam menghadapi tantangan seperti krisis demokrasi dan keberagaman, Pancasila berfungsi sebagai fondasi yang kokoh karena mengandung nilai-nilai, standar, serta aturan negara. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dari ide-ide sentral UUD 1945 dan mampu membentuk sistem hukum Nasional karena Pancasila merupakan dasar dari segala hukum di Indonesia (Nasoha et al., 2025).

Banyak pihak yang menyoroti bahwa kebijakan fiskal dan moneter nasional belum sepenuhnya adaptif terhadap ekosistem digital yang berkembang pesat. Dalam konteks inilah, keberadaan mata uang digital bank sentral (CBDC) juga mulai dikaji sebagai opsi oleh Bank Indonesia, meskipun belum ada regulasi definitif yang mengatur penggunaannya secara umum (Noor et al., 2023). Hal ini menegaskan pentingnya negara untuk segera memiliki kerangka hukum yang adaptif dan responsif, tidak hanya untuk mengakomodasi pertumbuhan teknologi keuangan, tetapi juga untuk melindungi konsumen dan menjamin keberlanjutan sistem keuangan nasional.

Lebih jauh lagi, keberadaan nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi pedoman etis dalam menyikapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kemanusiaan tidak boleh diabaikan dalam penyusunan regulasi baru (Nasoha et al., 2025). Dalam perspektif ini, pendekatan hukum berbasis Pancasila berfungsi sebagai pengimbang dari dominasi narasi pasar bebas dan deregulasi yang kerap tidak memperhatikan aspek keadilan distribusi.

Pentingnya perlindungan hak warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa UUD 1945, khususnya pasal 28A–28J, menjadi dasar utama perlindungan hak asasi manusia secara konstitusional. Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia juga diperkuat melalui instrumen hukum nasional dan internasional. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial, dan belum serasinya regulasi. Artikel ini menekankan perlunya penguatan sistem hukum dan komitmen pemerintah agar perlindungan hak warga negara benar-benar terwujud dalam kehidupan demokratis (Nasoha et al, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Literasi keuangan digital di Indonesia mengalami kemajuan pesat seiring dengan bertambahnya akses serta pengetahuan masyarakat tentang layanan keuangan berbasis teknologi. Hal ini sangat penting dan perlu dikuasai oleh masyarakat agar pengelolaan keuangan menjadi lebih aman dan efisien. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, semangat gotong royong, dan tanggung jawab sosial, berperan penting dalam literasi keuangan digital, yang merupakan kunci untuk membangun karakter finansial yang etis dan inklusif. Peran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai ini, agar generasi muda bisa mengelola keuangan dengan cerdas dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Dukungan dari pemerintah, OJK, serta sektor keuangan dalam proses edukasi dan inklusi keuangan semakin memperkuat hubungan antara literasi digital dan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila, terutama gotong royong dan keadilan sosial, harus diintegrasikan agar literasi tidak hanya menjadi soal teknis, tetapi juga menyangkut aspek etika dan karakter.

Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dan memperkuat literasi keuangan digital. Dukungan dari pemerintah dan OJK melalui program edukasi serta inklusi keuangan digital telah menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan perluasan serta penguatan berkelanjutan. Pengembangan kurikulum, pelatihan bagi guru, dan penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memperkuat integrasi nilai dan literasi agar sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Literasi keuangan digital di Indonesia terus meningkat, namun kualitasnya perlu diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan digital dengan aman, bijak, dan bertanggung jawab. Nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, harus dipadukan dalam edukasi literasi keuangan digital untuk membangun karakter pengguna yang etis dan peduli sosial.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi alat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai dan etika digital melalui pendekatan praktis serta diskusi mengenai kasus nyata. Program-program pemerintah dan OJK seperti agen digital telah berhasil memperluas akses keuangan digital, namun masih diperlukan perbaikan pada infrastruktur dan sumber daya manusia agar distribusinya lebih merata. Edukasi harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi, terutama mengenai keamanan data dan perlindungan konsumen digital, agar masyarakat semakin cerdas dan terlindungi. Transformasi digital pemerintah dan Pancasila harus inklusif dan berlandaskan pada nilai keadilan Pancasila.

Konsep kewarganegaraan dalam konstitusi diatur dalam Pasal UUD 1945 dan dijelaskan lebih lanjut di dalam UU No. 12 Tahun 2006, yang menekankan posisi hukum individu sebagai warga negara serta hak dan kewajibannya. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital sangat penting dan strategis untuk membangun warga negara yang terampil dalam aspek teknologi dan finansial, sembari tetap beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini berkontribusi pada terjaganya keadilan dan persatuan nasional di tengah cepatnya perkembangan teknologi keuangan yang semakin kompleks. Pendidikan kewarganegaraan modern perlu merancang program yang tidak hanya menekankan keterampilan digital, tetapi juga memperkuat karakter kebangsaan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, agar kemajuan ekonomi digital dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Saran

- a. Pendidikan formal perlu mengembangkan modul literasi keuangan digital berbasis nilai Pancasila secara sistematis dan aplikatif.
- b. Pemerintah dan OJK harus terus memperluas program edukasi keuangan digital yang menekankan nilai etika dan sosial dalam pengelolaan keuangan.
- c. Pelatihan bagi guru dan fasilitator literasi keuangan harus difokuskan agar mereka mampu mengajarkan materi yang kaya nilai kebangsaan dan moral.
- d. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengukur efektifitas integrasi nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital di berbagai lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Assidiq, R., et al. (2023). Pelestarian nilai Pancasila pada pendidikan literasi keuangan digital.
- Azizah, R. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter digital berorientasi nilai kebangsaan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3), 215-230.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan pemanfaatan agen laku pandai untuk inklusi keuangan*.

- CNBC Indonesia. (2025). Indeks literasi keuangan digital Indonesia meningkat pesat. Retrieved from CNBC Indonesia.
- Dewi, S. (2024). Pentingnya etika digital dalam literasi keuangan di era transisi teknologi. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(1), 45-61.
- GoodStats. (2025). *Laporan kesenjangan literasi keuangan di Indonesia*. GoodStats.
- GoodStats. (2025). *Laporan statistik kesenjangan literasi keuangan di Indonesia*. GoodStats.
- Green Publisher. (2025). *Cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar*. greenpublisher.id.
- Hidayat, A. (2024). Nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam pendidikan kewarganegaraan modern. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 5(2), 99-115.
- Husni, M. (2023). Integrasi nilai kebangsaan dalam kurikulum digital: Studi kebijakan pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(4), 145-160.
- IAIN Parepare. (2020). Pemanfaatan teknologi digital dalam literasi keuangan mahasiswa.
- Infobanknews. (2025). Perkembangan literasi dan inklusi keuangan digital.
- Infopublik. (2025). Upaya pemerintah tingkatkan literasi keuangan digital.
- Instagram OJK. (2025). Edukasi keuangan digital berbasis nilai kebangsaan. Postingan resmi OJK di media sosial.
- Kemendikbud. (2025). *Kurikulum pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Pancasila*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kim, Y., & Lee, J. (2021). National ethics integration in digital financial literacy education: A comparative study. *International Journal of Citizenship Education*, 10(2), 92-108.
- Kompas. (2025). Kesenjangan literasi keuangan digital antara perkotaan dan pedesaan. *Kompas*.
- Kurikulum Kemendikbud. (2025). *Prinsip pendidikan PINTAR dalam literasi keuangan digital*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mulyani, L., & Prasetyo, E. (2023). Model pendidikan holistik untuk literasi digital berbasis nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia*, 7(1), 30-47.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Myoriuke, M., Dewanti, L., & Nikmah, T. K. (2025). Blockchain kripto dan Pancasila: Kajian hukum internasional terhadap perdagangan elektronik. *Jurnal Dakwah dan Hukum Internasional*, 1(1), 35-48. Yayasan Irsyadul Ibad Mojopurno.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, E. H. Putri, N. M. Prameswati, S. D. I. D. Purnamasari. (2025). *Jurnal Perlindungan Hak Warga Negara dalam Negara Demokrasi: Perspektif Konstitusional dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, F. Febrian, L. Khairunnisa, A. D. Mahardika, Salsabila. (2025). Konsep dan urgensi dasar negara kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, M. R. Ridho. (2025). Digital Pancasila: Strategi komunikasi dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan di era media sosial. *Jurnal Hukum Administrasi Publik dan Negara*.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, Nursifa. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional. *Jurnal Begawan Hukum*.

- Nugroho, D. (2022). Hambatan implementasi nilai Pancasila pada literasi keuangan digital di sekolah menengah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia*, 10(3), 112-127.
- OJK & BPS. (2025). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2025*. Jakarta: OJK & BPS.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Program bulan literasi keuangan dan edukasi digital*. Jakarta: OJK.
- Purwantoro, S. A., et al. (2021). Integrasi nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital.
- Rahman, F. (2022). Integrasi nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital untuk pelajar. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 9(2), 75-88.
- Salsabila, M. (2025). Literasi keuangan dan perilaku konsumtif mahasiswa. *Skripsi, Universitas Pancasila*.
- Santiko, R. (2023). Kajian model integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum literasi digital. *Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Teknologi*, 4(2), 64-79.
- Santiko, R. (2023). Model integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum literasi digital. *Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Teknologi*, 4(2), 64-79.
- Santoso, B., Wibowo, T., & Sari, N. (2023). Literasi keuangan digital berbasis budaya lokal dan nilai Pancasila. *Jurnal Ekonomi dan Kebudayaan*, 11(1), 150-165.
- Siaran Pers Harlah Pancasila. (2025). Penanaman nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Skripsi UNISSULA. (2025). Pengaruh fintech terhadap kualitas laporan keuangan koperasi di Indonesia. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Telkom University. (2023). *Penulisan daftar pustaka dari buku dan artikel*. Makassar: Telkom University Press.
- The Stance. (2025). Kolaborasi BNI dan Universitas Pancasila dalam literasi keuangan digital mahasiswa. *The Stance*.
- TopBusiness. (2025). Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan anak muda. *TopBusiness*.
- UIN Ar-Raniry. (2021). *Laporan pelatihan literasi keuangan digital dan inklusi keuangan*.
- Univ Jambi. (2021). Pengaruh literasi keuangan digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa.
- Univ Muhammadiyah Surabaya. (2022). Edukasi keuangan digital berbasis nilai kebangsaan.
- UPN Veteran Jakarta (UPNVJ). (2025). *Pendidikan kewarganegaraan dan nilai Pancasila dalam literasi digital*. Jakarta: UPNVJ Press.
- UPN Veteran Jakarta. (2025). *Pelatihan guru kewarganegaraan berbasis literasi keuangan digital*.